

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2017-2023

Chintya Frahita<sup>1</sup>; Siti Fatimah Nurhayati<sup>2</sup>

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2</sup>

Email : b300210093@student.ums.ac.id<sup>1</sup>; sfn197@ums.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Ketidakmerataan distribusi pendapatan rumah tangga atau individu dalam suatu perekonomian dikenal sebagai ketimpangan pendapatan. Kesalahan ini terjadi di tingkat lokal dan nasional. Untuk mengukur disparitas pendapatan, indeks Gini digunakan. Indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah orang yang bekerja (JOB) memengaruhi disparitas pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari 2017 hingga 2023. Daerah DIY dipilih karena memiliki banyak potensi ekonomi. Dianalisisnya ketimpangan yang signifikan karena potensi dampak mereka dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Metode analisisnya mempergunakan regresi data panel. Metode ini menggabungkan data sekelompok waktu dan data cross-section. Data kumpulan waktu memuat informasi sejak 2017 hingga 2023. Sementara, data *cross-section* mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Sleman Gunung Kidul, Bantul, hingga Kulonprogo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data sekunder untuk jenis data ini. Mengacu uji Chow dan Hausman, *Pooled Least Square (PLS)* dipilih untuk menjadi model estimasi terbaik. Berdasarkan hasil model estimasi terbaik, diketahui bahwa IPM dan JOB memengaruhi ketimpangan pendapatan secara positif dan signifikan; sebaliknya, jumlah penduduk miskin memengaruhi ketimpangan pendapatan secara negatif. Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa IPM, JPM, TPT, dan JOB secara bersama-sama memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan; Indeks Pembangunan Manusia; Jumlah Penduduk Miskin; Tingkat Pengangguran Terbuka

### ABSTRACT

*Income inequality is the unequal distribution of family or individual income within an economy. This discrepancy is present both nationally and locally. The Gini index is used to quantify income disparity. Between 2017 and 2023, the Special Region of Yogyakarta's income disparity is influenced by the Human Development Index (HDI), the number of employed persons (EMP), the open unemployment rate (OUR), and the number of poor people (NPP). The DIY region's robust economic potential led to its selection. Significant gaps are examined because they can exacerbate inequality in access to education and healthcare. Panel data regression is used in the analysis process. This approach blends cross-sectional and time series data. The time series data includes information from 2017 to 2023. Yogyakarta City, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulonprogo, and the Special Region of Yogyakarta are the six regencies/cities that are included in the cross-section data. The Central Bureau of Statistics (BPS) collects secondary data for this type of information. The Chow and Hausman tests*

*demonstrated that the optimal estimation model was Pooled Least Squares (PLS). The results of the best estimation model show that the number of employed people and the HDI have a positive and significant impact on income inequality, whereas the NPP has a negative effect. Additionally, the findings of the F-test indicate that the NPP, the OUR, the HDI, and EMP all have an impact on income inequality.*

*Keywords : Income Inequality; Human Development Index; Number of Poor Population; Open Unemployment Rate*

## PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan rumah tangga atau individu dalam suatu perekonomian (Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, 2015). Adanya gap pendapatan antara orang yang penghasilannya tinggi dan yang penghasilannya rendah memicu ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi (Shinetiara & Adry, 2023). Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penduduk yang berpemasukan tak merata antara satu dengan yang lainnya. Fenomena tersebut tentu menimbulkan ketakseimbangan ekonomi antar masyarakat tersebut (Amri Khairul, 2017).

Menurut Ilham & Pangaribowo (2022) menjelaskan, adanya ketidakmerataan ini disebabkan beragam faktor. Faktor ini tak sebatas dari sisi individual manusia, tapi juga dari hal-hal di luar, dari mulai faktor alami berupa keadaan alam hingga geografis tempat masyarakat bermukim yang bisa saja memengaruhi potensi alamnya. Itulah mengapa, penghasilan penduduk banyak berbeda satu sama lain. Fenomena tersebut mengakibatkan fenomena ketimpangan pendapatan. Ketakseimbangan pembangunan ini termasuk faktor yang menyebabkan ketimpangan terjadi. Sejumlah daerah bisa maju, tapi di sisi lain wilayah lain justru sebaliknya. Terlebih kemampuan tiap daerah mengembangkan wilayahnya juga yang mempunyai perbedaan satu sama lain. Pada pengembangan daerah, barangkali terdapat wilayah yang menyimpan kekayaan alam lebih besar, tapi sumber daya manusianya kurang memadai. Di sisi lain, terdapat wilayah yang kekayaan alamnya rendah, tapi sumber dayanya memadai. Dua fenomena tersebut mengakibatkan makin berbedanya pendapatan penduduk di tiap wilayah pada sebuah negara (Nurpita & Nastiti, 2016).

Pada umumnya, negara berkembang, misalnya Indonesia menghadapi dua masalah yang relatif serius, berupa kesenjangan ekonomi ataupun ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan diakibatkan ketidakmerataan persebaran pendapatan penduduknya (Rachmawatie, 2021). Hal tersebut tak sebatas berlangsung pada skala nasional, tapi pula meluas hingga skala

daerah (Khoirudin & Musta'in, 2020). Fenomena tersebut juga dialami provinsi daerah istimewa Yogyakarta (DIY) karena adanya aspek berbeda dari segi perekonomian wilayah yang memang sudah maju dan sisi kekayaan yang ada di tiap wilayahnya, serta fokus pengembangan daerah yang relatif memadai, seperti yang dialami kabupaten Kulon Progo dan kota Yogyakarta (Kusuma et al., 2019).

Indeks Gini ialah sebuah alat pengukur ketimpangan yang kerap dipergunakan (Damanik et al., 2018). Skor *Gini rasio* yang makin dekat dengan angka satu mengindikasikan makin tinggi tingkat ketimpangannya, yang artinya perlu upaya strategis agar skor ini lebih dekat dengan angka nol yang mengindikasikan persebaran pendapatannya relatif lebih merata (S. Dai et al., 2023). Lihat Gambar 1, memperlihatkan bahwa ketimpangan antara Kabupaten/Kota di provinsi DIY cukup fluktuatif setiap tahunnya. Jika dilihat dari tingkat kategori indeks Gini maka Daerah Istimewa Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki angka rata-rata rasio Gini yang masuk dalam kategori sedang (0,4 - 0,5) dan Gunungkidul masuk dalam kategori rendah (0 - 0,4). Kota Yogyakarta memiliki *Gini rasio* yang paling tinggi di tahun 2022 yakni senilai 0,519. Sementara, pada Gini Ratio yang paling rendah yaitu di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun yang sama sebesar 0,316 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Ketimpangan pendapatan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika kekayaannya terfokus pada sekelompok orang saja, daya beli masyarakatnya pun menjadi terbatas. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai daerah yang memiliki ekonomi industri unggulan seperti pariwisata, pendidikan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyanggah perbedaan pendapatan yang masih cukup lebar. Sektor pariwisata ini mendorong perputaran ekonomi yang besar, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga industri kreatif dan kerajinan tangan. Sektor pendidikan tinggi Yogyakarta, yang memiliki banyak universitas terkemuka, terus berkontribusi besar pada ekonomi regional. UMKM DIY, terkenal dengan kreativitas dan keanekaragaman produk lokalnya, termasuk sektor yang berpotensi meningkatkan ekonomi daerah. Digitalisasi dan transformasi ekonomi mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menelaah variabel yang memengaruhi ketidakmerataan pendapatan pada provinsi DIY tahun 2017-2023, dengan tujuan

diharapkan bisa memberi keilmuan dan data yang lebih komprehensif terkait dinamika ketimpangan pendapatan di DIY. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi acuan mengembangkan studi lebih lanjut, sehingga bisa menjadi referensi ataupun pembanding dalam mengkaji masalah ketimpangan pendapatan pada waktu mendatang.

### TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan distribusi pendapatan ialah adanya pendapatan berbeda yang tercipta di tengah penduduk suatu wilayah, hingga menimbulkan kemampuan yang nyata dalam ekonomi. Ketimpangan ini bisa menyebabkan beberapa hal, di antaranya (Todaro & Smith, 2015):

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem bisa mengakibatkan ketidakefisienan ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem memperlemah kestabilan dan kemampuan penduduk dalam bersolidaritas sosial.
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem kerap dipandang merupakan bentuk ketidakadilan.

Kesenjangan pendapatan yang makin lebar memicu beragam permasalahan lain, dari mulai peningkatan jumlah penduduk menganggur, terbatasnya fasilitas pendidikan kesehatan yang memadai, hunian, belum tercukupinya kebutuhan pokok, hingga kurangnya keamanan, dan sebagainya (Mahrizal, 2014).

Banyak aspek yang menjadikan ketimpangan pendapatan ini terus terjadi, satu di antaranya ialah bisa diakibatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut penelitian Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) makin rendahnya skor IPM, mengindikasikan rendahnya produktivitas penduduknya dan mengakibatkan pendapatannya juga lebih rendah. Mengacu studi dari (Fachruurrozi & Hasmarini, 2023) yang menjelaskan, variabel IPM mengindikasikan pengaruhnya yang signifikan dan positif kepada ketimpangan pendapatan, yang diartikan bila IPM naik, ketimpangan pendapatannya juga cenderung naik. Temuan tersebut menggambarkan bahwa wilayah dengan peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan, yang diukur melalui IPM, menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini akan berdampak pada upah yang lebih tinggi bagi sebagian tenaga kerja. Namun, perbedaan dalam kualitas tenaga kerja diantara individu dapat menyebabkan

ketimpangan upah, yang pada akhirnya mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

H<sub>1</sub>: indeks pembangunan manusia memengaruhi ketimpangan pendapatan

Studi Muharam (2022) membahas analisis ketidakmerataan pendapatan di provinsi DIY tahun 2015–2020. Tujuan penelitiannya menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi, pendidikan, jumlah penduduk serta kemiskinan berpengaruh kepada ketimpangan pendapatan di DIY. Metode penelitiannya mempergunakan analisis regresi data panel. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, kemiskinan memengaruhi positif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan yang diartikan, ketika kemiskinan meningkat, bisa dinyatakan ketimpangan pendapatannya juga meningkat dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan jumlah masyarakat miskin di tiap-tiap kabupaten/kota memiliki perbedaan yang cukup jauh dan pertumbuhan ekonomi belum merata juga menjadi salah satu masalah kemiskinan semakin tinggi yang menyebabkan masyarakat yang kaya akan makin mendulang kekayaan lagi dan masyarakat miskin makin berpenghasilan rendah sehingga upaya pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan di Provinsi Yogyakarta. Studi dari Shinta & Nurhayati (2023) tujuan dari penganalisisan sejumlah faktor yang memengaruhi pada timpangnya pendapatan di Pulau Sulawesi dari tahun 2015 hingga 2023 adalah untuk mengetahui bagaimana TPT, UMP, presentase penduduk miskin dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Sulawesi dari tahun 2015 hingga 2023. Alat analisisnya berupa regresi data panel. Hasilnya membuktikan, presentase penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini berasal dari pengaruh beragam aspek selain presentase penduduk miskin, seperti distribusi kekayaan, kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan kesempatan kerja.

H<sub>2</sub>: jumlah penduduk miskin memengaruhi ketimpangan pendapatan

Tingginya jumlah pengangguran terbuka bisa menjadi kendala pembangunan dikarenakan pengangguran mengakibatkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang berarti semakin memperparah ketimpangan pendapatannya (Hindun et al., 2019). Studi dari (Simalango & Setiawati, 2024) mengenai analisis variabel yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada Kawasan Gerbangkertosusila. Metode dalam menganalisis datanya mempergunakan analisis regresi data panel. Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan hasil senilai

0,008833 dan memiliki hubungan positif, diartikan bahwa saat Tingkat Pengangguran Terbuka naik 1%, bisa dinyatakan ketimpangan pendapatannya pun naik. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdampak besar pada ketimpangan pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila dari tahun 2013 hingga 2022. Dalam konteks ekonomi, masalah pengangguran sering terjadi karena dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan.

H<sub>3</sub>: tingkat pengangguran terbuka memengaruhi ketimpangan pendapatan

Arif & Wicaksani (2017) menjabarkan, peningkatan jumlah tenaga kerja di sebuah wilayah bisa mengakibatkan perekonomian makin bertumbuh. Padahal, perekonomian yang bertumbuh tak selalu memicu keberhasilan pembangunan perekonomian. Malahan sebaliknya dengan perekonomian yang bertumbuh dapat mengakibatkan ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan. Studi Putri et al., (2015) mengenai analisis variabel yang memengaruhi peningkatan ekonomi dan ketidaksamaan pendapatan di Indonesia. Studi ini mempergunakan analisis model persamaan stimultan dan metodenya berupa *Indirect Least Square (ILS) Common Effect*. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, produktivitas tenaga kerja memengaruhi secara signifikan dan positif kepada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Perbedaan tiap daerahnya dari sisi produktivitas para pekerja mengakibatkan terdapat wilayah yang maju dan kurang maju. Fenomena tersebut menimbulkan ketidakseimbangan pembangunan di tiap daerah. Bila tak diperhatikan, ketimpangan pendapatan antardaerah pun juga bisa saja makin besar di masa mendatang.

H<sub>4</sub>: jumlah orang yang bekerja memengaruhi ketimpangan pendapatan

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Fokus penelitian adalah bagaimana ketimpangan pendapatan DIY dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah orang yang bekerja dari tahun 2017 hingga 2023. Dengan demikian, subjek atau objeknya adalah ketimpangan pendapatan di provinsi DIY kurun waktu 2017-2023. Ketimpangan penting dianalisis karena dampaknya yaitu dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan

layanan kesehatan, ketimpangan pendapatan yang besar sering kali menurunkan daya beli kelompok berpendapatan rendah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Diambil daerah DIY karena DIY merupakan daerah yang berpotensi ekonomi lebih tinggi. Biasanya wilayah semacam itu, seringkali distribusi pendapatannya tidak merata, terdapat ada perbedaan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data sekunder untuk jenis data ini. Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder ialah sumber data yang tak langsung didapat melalui sumber aslinya, misal lewat perantara ketiga ataupun dokumen tertentu. Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Studi ini berdasar pandangan Zed (2014: 3) ialah rangkaian tahapan dalam meneliti terkait cara mengumpulkan data yang sifatnya kepustakaan dan melakukan pembacaan serta pencatatan hingga pengolahan data yang didapat. Adapun data-data yang dipergunakan mencakup variabel dependen dan independen. Variabel dependennya berupa ketimpangan pendapatan, sedangkan untuk variabel independen berupa: indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah orang yang bekerja (JOB). Definisi operasional menurut Badan Pusat Statistik (2021): indeks pembangunan manusia ialah indikator komposit sebagai pengukur hasil pembangunan mutu hidup manusia. Penduduk miskin ialah seseorang yang rerata konsumsi per kapitanya tiap bulannya termasuk kurang dari titik minimal kebutuhannya, yakni dihitung dengan satuan ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka ialah persentase rasio penduduk yang menganggur dan jumlah angkatan kerjanya, dengan satuan pengukurannya yaitu persen. Tenaga kerja ialah individu yang bisa bekerja agar memproduksi produk tertentu, guna pemenuhan kebutuhannya ataupun orang sekitarnya, yang satuan pengukurannya yaitu jiwa.

Analisis regresi data panel adalah metode yang mengombinasikan rangkaian data cross-section dan waktu pada penelitian ini. Rangkaian data dari tahun 2017 hingga 2023 (tujuh tahun) digunakan, dan rangkaian data mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan kota Yogyakarta sehingga total data adalah 42. Persamaan regresi linier berganda data panel yang dipergunakan bisa disimak, yakni (Ghozali & Ratmono, 2017):

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 \log JPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 \log JOB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>KP</i>	: Ketimpangan Pendapatan, Gini Ratio Kabupaten/Kota
<i>IPM</i>	: Indeks Pembangunan Manusia
<i>JPM</i>	: Jumlah Penduduk yang Miskin (Ribu Jiwa)
<i>TPT</i>	: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
<i>JOB</i>	: <sup>Jumlah</sup> Orang yang Bekerja (Jiwa)
<i>log</i>	: Operator Logaritma Natural
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1... \beta_3$	: Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	: Kabupaten/Kota ke- <i>i</i> Daerah Istimewa Yogyakarta (6 Kabupaten/Kota)
<i>t</i>	: Tahun ke- <i>t</i>
$\varepsilon$	: Error term

Beberapa model estimasi yang terdapat dalam data panel meliputi *Common Effects Model (CEM)*, *Fixed Effects Model (FEM)* dan *Random Effects Model (REM)*. Guna memilih model terbaik untuk data panel, pengujian Chow dan Hausman digunakan. Uji Chow membandingkan estimasi antara CEM dan FEM untuk menentukan model terbaik. Kemudian, uji dilanjutkan guna menentukan jenis model estimasinya antara REM dan FEM; FEM menganggap efek individual tetap dan berkorelasi dengan variabel independen. Uji Hausman membandingkan estimasi REM dan FEM untuk menentukan model mana yang lebih tepat. Jika Uji Hausman mengindikasikan, tak terdapatnya perbedaan signifikan pada estimasi antara REM dan FEM, FEM akan disarankan karena dapat memberikan estimasi yang lebih konsisten. Namun, jika hasil uji Hausman tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, REM mungkin lebih disukai karena lebih efisien. Setelah menentukan model yang terbaik, langkah berikutnya adalah menguji model terbaik yang meliputi uji validitas dan signifikansi model dengan uji t, uji F hingga *R-square*.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan estimasi model ekonometrik melalui metode PLS, FEM, dan REM serta temuan pengujian untuk memilih model yang sesuai tersaji melalui Tabel 1.

Uji Chow mengindikasikan, model *PLS* dipilih untuk menjadi model estimasi paling baik, tampak melalui probabilitasnya ataupun signifikansi empirik statistik *F* senilai 0,9855 ( $> 0,10$ ). Sedangkan uji Hausman terlihat tidak valid karena *estimate cross-section effect variance is zero*, dan efek wilayahnya, karenanya bernilai nol untuk semua wilayah. Kesimpulannya model terbaik adalah *Pooled Least Square (PLS)*. Hasil lengkap estimasi PLS disajikan melalui Tabel 2.

Mengacu uji t hasil estimasi model terbaik (Tabel 2), nampak dari kelima variabel yang ada didalam model ekonometrik, terdapat tiga variabel yang memengaruhi ketimpangan pendapatan berupa indeks pembangunan manusia dengan probabilitas sebesar 0,0000 ( $< 0,01$ ), jumlah penduduk miskin dengan probabilitas 0,0002 ( $< 0,01$ ) dan jumlah orang yang bekerja dengan probabilitas 0,0012 ( $< 0,01$ ).

Lihat Tabel 3, berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa IPM dan JPM memengaruhi secara positif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan, sementara jumlah orang bekerja memengaruhi secara negatif kepada ketimpangan pendapatan. Untuk variabel tingkat pengangguran terbuka tak memengaruhi ketimpangan pendapatan karena probabilitas t-statistik koefisiennya lebih dari 0,10.

Variabel indeks pembangunan manusia probabilitasnya senilai 0,0000 dan koefisien regresinya senilai 0,0106. Artinya, IPM berpengaruh positif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut relevan dengan studi (Nurain & Juliannisa, 2022) yang membuktikan, di lima Provinsi yang paling timpang di Indonesia, IPM memengaruhi ketidakmerataan pendapatan secara signifikan dan memiliki koefisien positif. Diartikan, tiap naiknya IPM nantinya menaikkan ketimpangan yang ada. IPM memengaruhi positif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan diakibatkan ketidakmerataan capaian IPM pada sejumlah daerah dikarenakan rendahnya sarana yang mendukung dari sisi fasilitas pendidikan dan kesehatannya. Rendahnya ketersediaan lapangan kerja yang ada menjadikan jumlah pengangguran pada sejumlah daerah yang capaian IPM paling tinggi relatif dominan dari pekerja yang pendidikannya tinggi, yang mana individu yang pendidikannya rendah sering terserap oleh lapangan ada dikarenakan biasanya mempunyai kesedia bekerja pada sektor mana pun.

Variabel jumlah penduduk miskin probabilitasnya senilai 0,0002 dan koefisien regresinya senilai 0,1034. Artinya, JPM berpengaruh positif kepada ketimpangan pendapatan. Menurut Hindun et al., (2019) menjabarkan, kemiskinan memengaruhi positif kepada ketimpangan pendapatan, dikarenakan bila SDM yang ada tidak berkualitas, tentu bisa mengakibatkan masyarakatnya tak bisa mendapat pekerjaan yang tentu tak bisa menghasilkan pendapatan dan mengakibatkan ketimpangan pendapatannya makin lebar. Hasilnya berlainan bila SDM yang tersedia andal dan potensial, tentu bisa mendapat pekerjaan dan tentu pendapatannya relatif lebih tinggi.

Variabel jumlah orang yang bekerja probabilitasnya senilai 0,0012 dan koefisien regresinya senilai -0,0901. Artinya, jumlah orang yang bekerja memengaruhi secara negatif kepada ketimpangan pendapatan. Temuan yang dihasilkan relevan dengan hipotesis yang dirumuskan, yakni peningkatan tenaga kerja menyebabkan naiknya ketimpangan pendapatan. Fenomena tersebut dikarenakan naiknya produktivitas pekerja yang tak merata antar daerah bisa mengakibatkan munculnya daerah yang cukup maju dan muncul pula daerah yang kurang maju produktivitas pekerjanya. Fenomena ini menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan daerah, yang bila dibiarkan menyebabkan ketimpangan pendapatannya makin lebar (Putri et al., 2015).

Variabel tingkat pengangguran terbuka probabilitasnya melebihi 0,10 yakni senilai 0,3263 dan koefisien regresinya senilai 0,0033. Artinya tingkat pengangguran terbuka tak memengaruhi ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut relevan dengan studi Syahputra et al., (2024) yang membuktikan, pengangguran tak memengaruhi positif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan di Provinsi. Sumatra Utara melalui probabilitasnya senilai 0.0979 yang melebihi 5%. Koefisiensi variabel tingkat pendidikan senilai 0,0979 yang diartikan pengangguran tak memengaruhi ketimpangan pendapatan, maka bila pengangguran nya meningkat, tak memengaruhi signifikan kepada ketimpangan pendapatan dan demikian pula kebalikannya.

Probabilitas *F-statistic* senilai  $0,0000 < 0,01$ . Diartikan IPM, JPM, TPT dan JOB secara bersamaan memengaruhi ketimpangan pendapatan pada provinsi DIY kurun waktu 2017-2023.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengindikasikan variasi variabel dependennya yang bisa diterangkan oleh variabel independennya pada model. Berdasarkan tabel 2, koefisien determinasi senilai 0,8126, diartikan sebesar 81,26% variasi perubahan ketimpangan pendapatan diterangkan variabel independennya, sementara sisa lainnya, sebesar 18,77% diterangkan faktor lainnya yang bukan bahasan yang diteliti.

### KESIMPULAN

Mengacu pengujian Chow dan Hausman, *Pooled Least Square (PLS)* dipilih untuk dijadikan model estimasi paling baik. Berdasarkan uji t, variabel yang berpengaruh adalah IPM, JPM, dan JOB. Sementara variabel tingkat pengangguran terbuka tak memengaruhi ketimpangan. Probabilitasnya pada F senilai 0,0000 ( $< 0,01$ ), diartikan IPM, JPM, TPT dan JOB secara bersamaan memengaruhi ketimpangan

pendapatan di provinsi DIY kurun waktu 2017-2023. Koefisien determinasinya dihasilkan senilai 0,8126, diartikan senilai 81,26% variasi ketimpangan pendapatan bisa diterangkan variabel independennya dan sisanya sebesar 18,77% diterangkan faktor lainnya yang bukan bahasan yang diteliti.

Masukan untuk penelitian yang akan datang supaya lebih baik maka dimungkinkan dengan menambah variabel lain yang berpengaruh dan mempergunakan model analisis yang berlainan demi menyempurnakan temuan ini. Sedangkan untuk saran praktiknya. Indeks pembangunan manusia harus ditingkatkan kualitasnya sehingga diharapkan dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas bagus dan jika seseorang yang memiliki gaji tinggi dan dapat membayar pajak sebagai pemasukan negara. Selanjutnya pajak tersebut dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan kembali kepada orang yang berpendapatan rendah sehingga mereka bisa bekerja disektor formal atau menciptakan usaha sendiri. Semakin banyak orang yang aktif bekerja, berarti meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, terutama di sektor-sektor yang lebih produktif, dapat tercipta lapangan kerja yang lebih beragam dan peluang yang lebih adil bagi kelompok berpenghasilan rendah yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Penting untuk meningkatkan akses orang miskin ke bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja yang lebih baik, mereka bisa meningkatkan pendapatannya dan memperkecil kesenjangan antara kalangan kaya dan miskin.

#### DAFTAR PUSTAKA

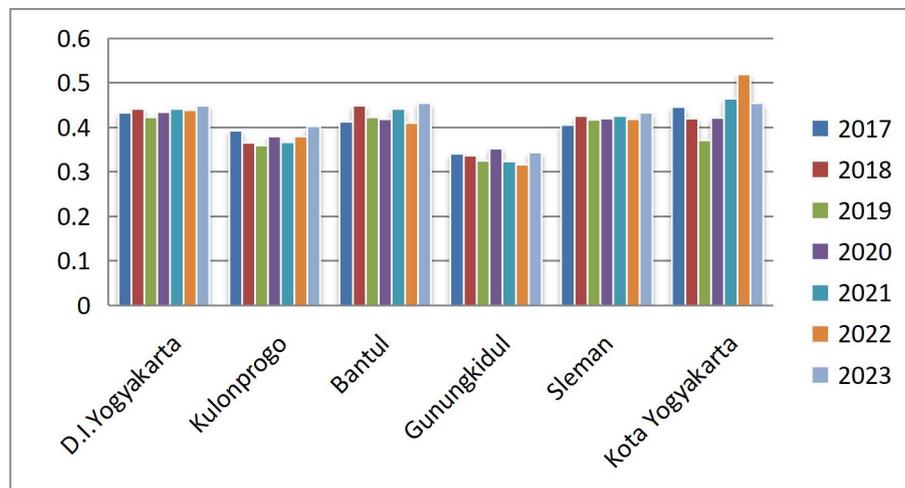
- Amri Khairul. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Ekonomidan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1–11. <http://journal.lembagakita.org>
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- BPS. (2023). *Gini ratio menurut kabupaten/kota*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/1/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html>
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>
- Fachruurrozi, M., & Hasmarini, I. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 674–680.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

- Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. (2022). *Analisis ketimpangan ekonomi menurut Provinsi di Indonesia tahun 2011-2025*. 16(1), 1–23.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 282–293. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1302419&val=17539&title=ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB INFLASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2017](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1302419&val=17539&title=ANALISIS%20PENGARUH%20PRODUK%20DOMESTIK%20REGIONAL%20BRUTO%20PDRB%20INFLASI%20DAN%20INDEKS%20PEMBANGUNAN%20MANUSIA%20IPM%20TERHADAP%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DAERAH%20ISTIMEWA%20YOGYAKARTA%20TAHUN%202011-2017)
- Mahrizal, A. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 2(2), 91–100.
- Muharam, K. I. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 284–294. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>.
- Nurain, H., & Juliannisa, I. A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v18i1.1960>
- Nurpita, A., & Nastiti, A. A. (2016). The Analysis of Development Disparities Inter Districts/ City in Special Region of Yogyakarta (DIY) Province 2003-2013. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jkap.9934>
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 102918.
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 831–838. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15720>
- S. Dai, S. I., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. *Jesya*, 6(1), 535–544. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.950>
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, M. N. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.
- Shinetiara, T., & Adry, M. R. (2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains*, 12(1), 25–32.
- Shinta<sup>1</sup>, R. A., & Nurhayati, S. F. (2023). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG*

*MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI TAHUN 2015- ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INCOME INEQUALITY IN SULAWESI ISLAND 2015-2023. 12(3).*

- Simalango, M., & Setiawati, R. (2024). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. 6(2), 276–285.*
- Syahputra, A., Daffa, D. S., & Siahaan, F. Z. (2024). No Title EAENH. *Ayan, 15(1), 37–48.*
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243.* [https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.](https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243)

**GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL**



Gambar 1 Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi DIY  
Sumber : BPS

Tabel 1 Perolehab Estimasi Regresi Data Oanel – *Cross section*

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	0,2494	0,1917	0,2494
<i>IPM</i>	0,0106	0,0100	0,0106
<i>LogJPM</i>	0,1034	0,0649	0,1034
<i>TPT</i>	0,0033	0,0034	0,0033
<i>LogJOB</i>	-0,0901	-0,0684	-0,0901
<i>R<sup>2</sup></i>	0,8126	0,8162	0,8126
<i>Adjusted. R<sup>2</sup></i>	0,7923	0,7645	0,7923
Statistik <i>F</i>	40,11433	15,79211	40,11433
Probabilitas Statistik <i>F</i>	0,0000	0,0000	0,0000
Pengujian Guna Memilih Modelnya			
(1) Uji Chow			
Cross- Section $F(5,32) = 0,1257$ ; Probabilitas $F(5,32) = 0,9855$			
(2) Uji Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(4) = 0,5402$ ; Probabilitas $\chi^2 = 0,9695$			

Tabel 2 Model Estimasi PLS

$$\begin{aligned}
 KP_{it} = & 0,2494 + 0,0106IPM_{it} + 0,1034\log JPM_{it} + 0,0033TPT_{it} \\
 & (0,0000)^* \qquad \qquad \qquad (0,0002)^* \qquad \qquad \qquad (0,3263) \\
 & -0,0901\log JOB_{it} \\
 & (0,0012)^*
 \end{aligned}$$


---

$R^2 = 0,8126$ ;  $DW = 1,8945$ ;  $F = 40,11433$ ; Prob.  $F = 0,0000$

Dalam hal ini:

\*Signifikansi di  $\alpha = 0,01$ ;

\*\*Signifikansi di  $\alpha = 0,05$ ;

\*\*\*Signifikansi di  $\alpha = 0,10$ ;

Nilai terdapat didalam kurung ialah probabilitas skor statistik t.

Tabel 3 Perolehan Regresi Data Panel PLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,249416	0,145723	1,711577	0,0953
IPM	0,010655	0,001546	6,891295	0,0000
LOG(JPM)	0,103425	0,024945	4,146121	0,0002
TPT	0,003328	0,003345	0,994755	0,3263
LOG(JOB)	-0,090163	0,025705	-3,507660	0,0012